

PESAN KOMUNIKASI RISIKO UNTUK MENURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA DI PROGRAM KAMPUNG IKLIM PEKAYON BEKASI

Tria Patrianti¹, Gatot Supangkat², Rihlah Nur Aulia³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

²Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia

¹tria.patrianti@umj.ac.id, ²supangkat@umy.ac.id, ³rihlah-nuraulia@unj.ac.id

Abstrak

Bekasi merupakan kota kedua tertinggi di Indonesia yang memiliki kualitas udara terburuk, sekaligus meraih banyak penghargaan dari pemerintah pusat atas kontribusinya menggerakkan masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim melalui program kampung iklim (proklim). Proklim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Aksi mengolah sampah, memanen air hujan, atau menggunakan teknologi ramah lingkungan telah menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak dalam Proklim. Pemerintah Kota Bekasi telah mengkomunikasikan pesan risiko pengendalian perubahan iklim untuk ketahanan iklim bagi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Dalam mengkomunikasikan risiko bencana lingkungan, pemerintah dianggap paling tepat sebagai komunikator risiko. Komunikasi risiko dengan pengembangan pesan yang baik akan memiliki peran strategis dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan menumbuhkan sikap serta perubahan perilaku untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pengembangan pesan komunikasi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam ketahanan bencana, menurunkan emisi dari sampah, merupakan salah satu contoh konkrit dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi komunikasi risiko dan pengembangan pesan risiko Pemerintah Kota Bekasi dalam Proklim dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan penelusuran dokumen pemerintah serta observasi partisipan dengan melibatkan diri pada komunitas proklim RW 11 Pekayon Jaya Bekasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa komunitas Proklim secara mandiri mengembangkan pesan risiko untuk menurunkan emisi GRK melalui program event, dan bermitra dengan korporasi dan perguruan tinggi.

***Kata kunci:** pesan resiko, mitigasi adaptasi perubahan iklim, GRK, Proklim*

RISK COMMUNICATION MESSAGE TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS IN THE CLIMATE VILLAGE PROGRAM IN BEKASI

Abstract

Bekasi, the second most polluted city in Indonesia, has been awarded for its efforts in controlling climate change through the Climate Village Program (Proklim). Proklim is a program that acknowledges the active involvement of communities in implementing integrated efforts for climate change mitigation and adaptation. The program supports national Green House Gas (GHG) emission reduction targets and helps increase community resilience to the impacts of climate change. Efforts to mitigate climate change at Proklim sites include waste processing, rainwater harvesting, and eco-friendly technology. The local government of Bekasi City has been spreading a message about the importance of controlling climate change to increase the resilience of the community against the negative effects of climate change. The government is considered the most suitable entity to communicate the risks of environmental disasters. Risk communication can strategically foster knowledge, attitudes, and behavior change for climate change mitigation and adaptation. One concrete way to combat climate change is by developing communication messages to encourage public participation in disaster resilience and reducing emissions from waste. The purpose of this research is to investigate risk

communication and develop risk messages in Proklim, using the O'Hair & John concept. The study uses a descriptive qualitative approach that involves observation techniques, interviews, searching for government documents, and participant observation by engaging with the RW 11 Pekayon Jaya Bekasi proklim community. This research found that the Proklim community partnered with corporations and universities and developed independent risk messages through event programs to reduce GHG emissions.

Keywords: *risk communication, risk messages, climate change adaptation mitigation, GHG, Proklim*

PENDAHULUAN

Dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis bahwa Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki tingkat frekuensi tertinggi kejadian bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan oleh iklim dalam kurun waktu 2017-2023. Jabodetabek disebut sebagai wilayah rawan bencana di Jawa Barat, dan Bekasi merupakan area rentan bencana (Dini, 2021; Fatimah, 2020). Bekasi sering mengalami kejadian banjir, longsor, dan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi (poskota, n.d.). Selama tahun 2022, terdapat 34 kejadian bencana di Bekasi akibat bencana iklim seperti banjir dan tanah longsor sehingga menimbulkan 1.183 kepala keluarga dengan total 4.422 jiwa menjadi warga terdampak. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun menyebabkan banyaknya tempat tinggal dan fasilitas umum mengalami kerusakan (Syah, 2022).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot Bekasi) telah merespon strategi KLHK dalam mengendalikan dampak buruk dari bencana iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi di tingkat tapak. Upaya pengendalian bencana tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan komunitas agar pesan risiko bencana iklim diketahui dan dipahami oleh populasi bencana dan khalayak sasaran. Pada kondisi inilah upaya mengkomunikasikan pesan risiko harus ditingkatkan agar terbangun pemahaman dari masyarakat tentang urgensi mengendalikan perubahan iklim sejak di tingkat tapak.

Bandana&Cochran dalam (Patrianti et al., 2020), menyatakan bahwa risiko merupakan "kejadian probablistik" yang dapat menimbulkan dampak negatif atau positif, serta mengakibatkan krisis atau peristiwa tak terduga yang menimbulkan ancaman signifikan. Komunikasi risiko dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan risiko untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan menggerakkan khalayak untuk bertindak (Covi and Kain 2016).

Pekayon Jaya, salah satu kelurahan yang berada di Bekasi, menjadi sangat istimewa. Tempat ini memiliki rukun warga yang telah mengantarkan kota Bekasi memenangkan penghargaan nasional tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena keberhasilannya mengelola wilayah yang rentan bencana iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasinya di Program Kampung Iklim. Setelah berhasil memenangkan penghargaan Utama di 2020, Kampung Iklim ini diganjar lagi penghargaan Lestari di tahun 2022(Bekasi Satu, 2022).

Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh KLHK untuk mendorong masyarakat melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah (Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 2020) Proklim mengacu pada Peraturan Menteri KLHK

Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.

Sebelum menjadi Proklim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi sebelumnya menjalankan peran sebagai fasilitator dalam penetapan Proklim oleh KLHK hingga terbentuknya Proklim RW 11 Pekayon Jaya Bekasi. Pendaftaran Program Kampung Iklim secara resmi dilakukan melalui SRN PPI (Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim). Tahapan proses pendaftaran dimulai oleh pengusul (Ketua RW dari wilayah setempat) untuk kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi lokasi pengusul melalui sekretariat Program Kampung Iklim. Verifikasi Program Kampung Iklim RW 11 Pekayon Jaya Bekasi sendiri dilakukan pada tahun 2018, dan dilakukan oleh DLH Bekasi. Verifikasi ini sebagai salah satu upaya pengecekan kesesuaian data dengan kondisi lapangan, sekaligus menjadi tonggak peresmian dari Program Kampung Iklim RW 11 Pekayon Jaya Bekasi.

Namun demikian, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum dan setelah Proklim terbentuk, belum signifikan melakukan penyampaian pesan komunikasi risiko kepada masyarakat atas potensi bencana iklim yang telah dipetakan oleh BNPB bahwa Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah Jabodetabek merupakan wilayah yang riskan dalam kebencanaan nasional. Komunikasi risiko adalah pertukaran informasi, saran dan pendapat antara para ahli atau pejabat dan orang-orang yang menghadapi bahaya atau ancaman terhadap kelangsungan hidup, kesehatan, atau kesejahteraan ekonomi atau sosial mereka (WHO, 2023). Komunikasi risiko terbukti menjadi alat penting dalam kesiapsiagaan dan respons darurat. Komunikasi risiko untuk memperkuat keberadaan Proklim dalam mengendalikan perubahan iklim belum sepenuhnya dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat atau potensi bencana iklim di wilayah ini.

Keterlibatan komunitas yang menggerakkan kampung iklim sudah dilakukan jauh sebelum Proklim ini terbentuk.

Berdasarkan pengamatan, wilayah ini telah membuat gerakan peduli lingkungan sejak tahun 2003, dimana gerakan ini dilakukan secara mandiri oleh warga Pekayon Jaya Bekasi sendiri. Dalam hal ini, sangat mudah bagi pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan risiko bencana jika komunitas telah terbentuk dan melakukan aksi heroik demi lingkungan hidup. Dari hasil observasi, pada kenyataannya Pemkot Bekasi melalui DLH belum memiliki format komunikasi risiko yang terencana dengan wilayah yang menjadi sasaran Proklim. Lembaga pemerintah ini berkoordinasi dengan komunitas dan wilayah setempat hanya untuk mengatur registrasi pada sistem registrasi nasional menjadi Kampung Iklim. Pemkot dan DLH Kota Bekasi belum memiliki komunikasi risiko dan pengembangan pesan risiko pada khalayak sasaran yaitu para penggerak kampung iklim. Penghargaan dan juara yang diraih proklim tidak berasal dari rangkaian atau komunikasi risiko yang berkelanjutan. Dalam beberapa kesempatan wawancara, baik dengan pemerintah daerah maupun komunitas penggerak proklim, komunikasi risiko belum disampaikan secara intens oleh DLH kepada penggerak kampung iklim. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggali kualitas komunikasi yang telah dilakukan pemerintah daerah kepada publik dan target khalayaknya sebagai upaya pengendalian bencana iklim, serta mengeksplorasi pengembangan pesan risiko pemerintah pada program kampung iklim. Komunikasi risiko dengan pengembangan pesan yang baik akan memiliki peran strategis dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan menumbuhkan sikap serta perubahan perilaku untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pengembangan pesan komunikasi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam ketahanan bencana, menurunkan emisi dari sampah, merupakan salah satu contoh

konkrit dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak.

Komunikasi Risiko dan Pesan Risiko

Menurut *United States Environmental Protection Agency* (US EPA), Komunikasi Risiko merupakan proses menginformasikan masyarakat tentang potensi bahaya terhadap orang, properti, atau komunitas mereka. Para ahli mendefinisikan komunikasi risiko sebagai pendekatan berbasis sains untuk berkomunikasi secara efektif dalam situasi stres tinggi, kekhawatiran tinggi, atau kontroversi. Komunikasi risiko bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang terkena dampak memahami proses penilaian dan pengelolaan risiko, untuk membentuk persepsi yang valid secara ilmiah mengenai kemungkinan bahaya, dan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana risiko harus dikelola. Alat komunikasi risiko adalah pernyataan tertulis, verbal, atau visual yang berisi informasi tentang risiko (Forney & Sadar, 2021). Bagi mereka yang mengkomunikasikan risiko, diperlukan pemahaman tentang apa risiko yang dimaksud. Pesan komunikasi risiko yang tidak menjawab permasalahan utama audiens atau tidak mempertimbangkan keyakinan yang ada akan gagal. Paling tidak, upaya komunikasi risiko harus mencakup beberapa analisis khalayak. Saat menyusun pesan risiko, perhatian penyusun pesan risiko harus dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting dan isu-isu yang penting bagi khalayak yang dituju. Oleh karena itu, untuk menyusun pesan risiko, harus memahami audiens secara menyeluruh. Sebagai contoh, komunikator perlu memahami karakter gaya hidup dan masing-masing kelompok audiens untuk menyesuaikan pesan risiko. Untuk mengkomunikasikan risiko, harus dipastikan bahwa pesan-pesan risiko dapat mengatasi kekhawatiran audiens (Lundgren, E. Regina, McMakin, 2013).

Strategi Pesan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, komunikator profesional harus mengkomunikasikan konsekuensi krisis, dan mengurangi ketidakpastian serta mengidentifikasi tujuh strategi pesan risiko. *Pertama*, organisasi harus membangun kesadaran akan ancaman untuk membantu masyarakat bersiap menghadapi ancaman. *Kedua*, organisasi memvisualisasikan ancaman untuk menyampaikan risiko, yang dapat membantu dengan cepat mengatasi ketidakpastian. Visualisasi risiko dianggap paling efektif jika bersifat hiper-lokal dan mencerminkan tingkat melek huruf masyarakat. *Ketiga*, organisasi menerjemahkan ilmu pengetahuan untuk membuat pesan risiko lebih mudah diakses oleh masyarakat. Perlu dihindari penggunaan istilah teknis yang berlebihan karena akan mengurangi motivasi untuk melindungi diri dan menghalangi komunikasi yang efektif. *Keempat*, organisasi memotivasi pengambilan tindakan perlindungan yang tepat. Melalui informasi instruksi yang etis, organisasi secara bertanggung jawab menggunakan kekuatan mereka untuk memberikan pendidikan melalui pilihan kata yang hati-hati, memperbarui waktu terjadinya badai, memperkuat pesan resmi di saluran media sosial pribadi, dan memberikan tindakan pencegahan khusus yang harus dilakukan masyarakat. Tindakan yang memotivasi juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk berbagi pesan risiko dengan teman dan anggota keluarga. Individu lebih cenderung mematuhi panduan tindakan perlindungan ketika pesan menyoroti manfaat bagi orang yang dicintai dibandingkan manfaat bagi individu. *Kelima*, organisasi dapat meminta bantuan dari masyarakatnya dan merekrut relawan. *Keenam*, organisasi memanusiasikan diri mereka sendiri untuk membangun hubungan dengan publik, misalnya dengan menampilkan kepribadian pemimpin dan menggunakan humor yang sesuai. *Ketujuh*, organisasi menggunakan narasi bersama untuk membangun hubungan dengan

publiknya. Para peneliti lain telah mencatat kekuatan penyampaian cerita komunitas dalam membangun ketahanan terhadap bencana (O'Hair & John, 2022)

Komunikasi risiko sangat penting dalam membangun resiliensi dari sebuah komunitas. Sebagai sebuah proses yang dinamis, komunikasi risiko memerlukan pertukaran informasi di antara para pemangku kepentingan untuk membantu upaya kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan sebelum, selama, dan setelah peristiwa ekstrem. Komunikasi risiko tradisional mengikuti pendekatan perintah dan kendali di mana informasi disebarluaskan dari lembaga manajemen darurat ke komunitas berisiko yang lebih luas. Pendekatan ini memastikan bahwa pesan-pesan peringatan yang akurat disebarluaskan dari sumber-sumber terpercaya melalui saluran-saluran seperti televisi, radio, dan telepon seluler ke komunitas-komunitas yang berpotensi terkena dampak bencana secara geografis. (Kar & Cochran Jr., 2019).

Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana Sendai 2015–2030 telah mengeluarkan kebijakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam mengembangkan dan memelihara sistem prakiraan dan peringatan dini yang berpusat pada komunikasi risiko bencana dan ketahanan masyarakat (United Nations, 2015). Komunikasi risiko akan berjalan dengan efektif jika terdapat pendekatan pada kelompok masyarakat dengan menekankan pada kolaborasi organisasi-publik untuk membangun dan mempertahankan ketahanan atau resiliensi masyarakat (O'Hair & John, 2022). Organisasi tersebut dapat berupa lembaga pemerintah seperti yang dinyatakan oleh (The World Bank, 2013) bahwa tahapan mitigasi yang perlu dilakukan terkait risiko bencana adalah adanya kepercayaan dari sumber informasi seperti pemerintah. Sumber informasi yang kredibel akan menimbulkan kepercayaan publik

sehingga mitigasi bencana akan mudah dilakukan.

Namun, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih kompleks dibandingkan dengan komunikasi di sektor privat, jika dilihat dari aspek tujuan, kebutuhan, dan khalayak sasarnya. Canel & Sanders dalam (Patrianti et al., 2020) menyatakan bahwa komunikasi risiko pemerintah dilakukan dalam lingkungan yang berlapis dalam struktur dan beragam. Oleh karenanya, komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah termasuk komunikasi pemerintah yang dilakukan sebagai peran, praktik, dan pencapaian komunikasi yang terjadi di dalam dan atas nama lembaga publik yang tujuan utamanya untuk melayani kebutuhan eksekutif atas alasan politik, dibangun melalui prinsip persetujuan rakyat secara langsung atau tidak langsung serta dibebankan untuk memenuhi tujuannya (Canel & Sanders, 2013). Dalam pengendalian perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi di Proklamasi, DLH Pemkot Bekasi belum memiliki proses penyampaian pesan risiko yang berkelanjutan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko perubahan iklim. DLH Pemkot Bekasi menyampaikan pesan risiko melalui kekuatan komunitas yang ada di Proklamasi. Salah satu informan di pemerintah daerah tersebut menyatakan bahwa komunikasi risiko yang dilakukan tidak mengolah pesan risiko untuk pengendalian perubahan iklim. Pemerintah daerah melakukan tugasnya secara administratif sebagai *leading sector* lingkungan hidup yang sesuai dengan fungsinya, membantu pembentukan proklamasi di daerah otonom (Ditjen Pengendalian Perubahan, 2018).

Praktik komunikasi risiko sangat penting dalam kebijakan dan peraturan yang mencakup bidang kebijakan seperti lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan binaan, infrastruktur. Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk

mengkomunikasikan penilaian potensi bahaya dan pengelolaannya kepada kelompok yang terkena dampak, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Sebagai bagian dari upaya kebijakan regulasi, pemerintah mengkomunikasikan risiko dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, industri, dan stakeholder penting lainnya (Boholm, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengembangan pesan risiko yang menjadi elemen komunikasi risiko dan pengembangan pesan risiko yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi kepada komunitas Proklam yang telah menjadi pemenang Proklam di kategori Lestari agar hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada perancangan strategi komunikasi risiko yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengendalikan bencana yang ditimbulkan oleh iklim, secara umum di Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, dan khususnya di wilayah Jabodetabek yang paling rentan dengan bencana tersebut. Penelitian yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menurunkan emisi GRK di tingkat tapak atau kampung iklim, dalam konteks pengembangan pesan risiko bencana hidrometeorologi belum pernah ditemukan. Penelitian tentang Proklam didominasi oleh kajian pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan publik (Afni Z, Fara Merian Sari, 2021; Furqan et al., 2020; Reza Rinaldy et al., 2017; Sugardiman, 2021). Satu penelitian dalam perspektif komunikasi tentang proklam ditemukan dengan bahasan strategi komunikasi berbasis pemberdayaan masyarakat (Fatkhullah et al., 2023). Terbatasnya penelitian komunikasi yang mengamati proklam, khususnya pada aspek pengembangan pesan risiko bencana hidrometeorologi di lokasi Proklam, dapat memperkaya kajian komunikasi dan berkontribusi pada menurunkan emisi GRK.

METODE

Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi masalah penelitian dengan bahasan makna individu atau kelompok yang merujuk pada masalah-masalah sosial (Creswell & Poth, 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada upaya mendeskripsikan, memahami, memprediksi, dan atau mengendalikan individu atau organisasi (Woodside, 2010). Kasus pengendalian perubahan iklim sebagai akibat dari buruknya krisis iklim di Kota Bekasi dan Jabodetabek. Data yang diambil pada studi kasus terdiri dari berbagai sumber, dari wawancara hingga penelusuran dokumen pemerintah, dan pemberitaan di media massa (Yin, 2018). Penelitian ini menguraikan peran pemerintah daerah yaitu Pemkot Bekasi yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai sumber komunikasi risiko dalam melibatkan komunitas pada kampung iklim melalui melalui aksi mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi emisi GRK. Penelusuran dokumen pemerintah pada pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak, dilakukan dengan mengamati renstra dan program serta mekanisme pembentukan kampung iklim di seluruh Indonesia. Pesan risiko dicermati melalui naras-narasi yang disampaikan oleh komunitas penggerak kampung iklim pada kunjungan penelitian ke Kampung Iklim Pekayon Jaya. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan penggerak komunitas di Kampung Iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kampung Iklim RW 11 Pekayon Jaya terletak di Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kampung Iklim ini dibentuk pada tahun 2003 dan menjadi salah satu Kampung Iklim yang meraih penghargaan tertinggi Proklam

Lestari dari KLHK. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Proklam di Kota Bekasi sebagian besar digerakkan oleh perempuan. Tidak berbeda dengan Proklam di RW 11 Pekayon Jaya. Diinisiasi oleh ibu-ibu yang aktif di majelis Taklim, kampung iklim ini dipimpin oleh Ibu Lala Gazali, dengan seluruh pengurusnya terdiri dari perempuan paruh baya. Kepengurusan Proklam RW 11 disahkan oleh Lurah Pekayon Jaya dan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Humas, dan bidang-bidang yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti; a) bidang pengendalian kekeringan dan banjir, b) ketahanan pangan, c) pengendalian penyakit terkait perubahan iklim, d) pengolahan sampah organik dan anorganik, e) peningkatan tutupan vegetasi, dan f) penggunaan energi baru, terbarukan, dan hemat energi (Pemerintah Kota Bekasi, 2021).

Seluruh pembedaan yang terbagi pada kepengurusan Proklam RW11 merupakan representasi seluruh pesan risiko yang dikomunikasikan oleh DLH Bekasi kepada para penggiat Proklam di empat wilayah Kota Bekasi. Diantara wilayah yang ada, Kampung Iklim RW 11 Pekayon Jaya merupakan Proklam yang progresif karena selalu aktif dan meningkatkan performanya hingga berhasil meraih penghargaan tertinggi yaitu Proklam Lestari. Tidak banyak pemberitaan atau publikasi atas raihan tertinggi Proklam ini selain pemberitaan di lingkup media lokal (Bekasi Satu, 2022). Namun, komunikasi risiko yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi cukup signifikan dalam menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko bencana hidrometeorologi yang sangat rentan terjadi di wilayah Jabodetabek. Pesan risiko yang menjadi unsur pelengkap yang memperkuat komunikasi risiko pemerintah adalah pentingnya melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menurunkan emisi GRK. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi secara intens melakukan komunikasi risiko kepada komunitas penggerak Proklam melalui saluran komunikasi kelompok

dan pertemuan rutin secara daring maupun luring. Disa Uniflora, Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menyatakan bahwa komunikasi dilaksanakan secara intens baik dengan perempuan penggiat proklam ataupun dengan pemimpin proklam secara langsung maupun *online*.

“Komunikasi dilaksanakan secara intens, minimal 12 kali dalam setahun baik langsung ataupun melalui *online* dan atau apabila dibutuhkan. DLH Kota Bekasi terbuka untuk diskusi setiap saat.” Berdasarkan hasil pengamatan saat kunjungan ke wilayah Proklam RW11, para pengurus yang mayoritas ibu-ibu paruh baya mendapatkan pendampingan dari DLH berupa materi peningkatan pengetahuan akan pesan risiko mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, juga sarana prasarana yang dibutuhkan Proklam itu sendiri, seperti tempat mengelola sampah. Selanjutnya, pesan risiko yang dipetakan terdiri dari mitigasi atau pencegahan terjadinya bencana, dan adaptasi yaitu penyesuaian ketika bencana iklim terjadi.

Disa menuturkan lebih lanjut, “Pesan risiko yang diberikan adalah pesan mitigasi perubahan iklim yang mengandung inti pesan tentang penggunaan lahan untuk ketahanan pangan, penggunaan energi terbarukan dan penghematan energi dengan menggunakan lampu LED serta memanfaatkan lampu panel surya, pengomposan, mempertahankan tanaman pelindung, dan lain sebagainya.”

Selanjutnya, pesan adaptasi perubahan iklim yang disampaikan Pemerintah Kota Bekasi pada Proklam terkait dengan upaya menyesuaikan kondisi wilayah dan sumber daya lainnya.

“Pemerintah memberikan komunikasi yang berisi pesan risiko adaptasi seperti memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat untuk memperbanyak biopori,

kegiatan pemberantasan penyakit akibat penyakit perubahan iklim, memanfaatkan lahan pekarangan/ psu untuk ketahanan pangan (hidroponik, aquaponik, vertikal garden), penampungan air hujan, upaya pengelolaan rumah sehat dan lain-lain.”

Pesan risiko mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dikembangkan oleh penggerak Proklam melalui pertemuan rutin antara para perempuan penggiat Proklam tersebut. Melalui pertemuan mingguan di Balai Warga, perempuan penggiat Proklam menyusun pesan risiko dari Pemkot Bekasi melalui pendampingan dari DLH. Sebelumnya, pihak DLH menjalankan pembinaan dan penguatan lembaga Proklam. Pembinaan tersebut meliputi sosialisasi dan bantuan sarana prasarana saat pengisian Sistem Registrasi Nasional (SRN) Proklam. Pemkot Bekasi sangat diuntungkan dengan keberadaan perempuan penggerak Proklam RW11. Para penggerak Proklam ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan pesan risiko secara teratur dan berkelanjutan. Meskipun belum memiliki kemampuan untuk

mengemas dan memanfaatkan media digital dalam mengembangkan pesan risiko mitigasi dan adaptasi, namun pesan-pesan risiko tersebut diaplikasikan ke dalam beberapa saluran komunikasi risiko yang memadai di wilayah Proklam RW11.

Berdasarkan pengamatan penelitian melalui kunjungan langsung ke Kampung Iklim RW11 Pekayon Jaya, komunikasi risiko dan pesan risiko dari Pemkot Bekasi dikembangkan melalui pesan inti mitigasi untuk menurunkan emisi GRK. Pengembangan pesan risiko secara bertahap disampaikan dalam bentuk *signage* atau papan petunjuk yang berisi pesan risiko. Secara mandiri, penggerak Proklam RW 11 Pekayon Jaya ini menyebarluaskan *signage* di setiap tempat strategis agar dapat dilihat oleh penduduk setempat sekaligus tamu yang hadir di wilayah ini.



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 1: Signage pesan Perubahan Iklim

Pesan risiko perubahan iklim disampaikan oleh para penggiat Proklam melalui media luar ruang. Tidak ada pesan khusus mitigasi perubahan

iklim pada spanduk di ruang terbuka. Pesan inti mitigasi perubahan iklim dikemas melalui *signages* di beberapa area strategis seperti lokasi

dekat tempat ibadah warga, tempat berolahraga dan pengumpulan sampah plastik. Dengan material yang berbeda, pesan mitigasi dikemas

dalam bentuk lebih menarik dan mudah dibaca karena terpasang di tempat yang dilalui banyak orang.



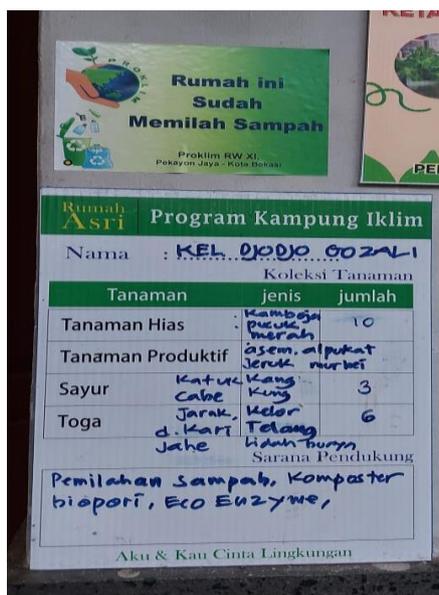
Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 2: pesan mitigasi untuk pemilahan sampah

Pesan mitigasi perubahan iklim didominasi oleh pemilahan sampah, pengurangan sampah plastik, dan kampanye bahaya penggunaan sampah plastik. Pesan mitigasi berbasis pengelolaan sampah ini disusun oleh para penggiat Proklamasi dengan materi yang didapat dari DLH Pemkot Bekasi saat komunikasi risiko dijalankan oleh Pemda. Para penggiat Proklamasi menyebarkan pesan inti pengelolaan sampah dengan aktif membangun sarana dan prasarana di setiap lokasi Proklamasi berupa tempat pemilahan sampah.

Dari hasil pengamatan penelitian, ditemukan banyak fasilitas berupa tempat pembuangan sampah yang telah dibedakan sesuai dengan peruntukan jenis sampah; organik dan anorganik. Dimulai dari tempat tinggal warga, penggiat Proklamasi menempelkan pesan

mitigasi untuk mengingatkan para pemilik rumah bahwa pemilahan sampah, merupakan langkah awal dalam mitigasi perubahan iklim. Secara sederhana, langkah ini merupakan keberlanjutan dari pesan risiko yang disampaikan oleh DLH Pemkot Bekasi sebelumnya. Selain pemilahan sampah, pada setiap rumah diberikan pesan mitigasi untuk mengelola dan membudidayakan tanaman produktif, tanaman hias, sayur dan toga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan meneguhkan setiap warga bahwa pengendalian perubahan iklim dimulai dari tingkat rumah tangga. Pesan mitigasi tersebut selalu ditanamkan pada benak khalayak sasaran.



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 3: Penempatan pesan mitigasi di rumah warga

Penempatan pesan risiko mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan sampah, penggiat Proklim memfasilitasi saluran pesannya di berbagai tempat yang mudah dicerna pesannya oleh seluruh warga. pengolahan sampah dan Di lokasi lapangan olahraga, warga bahkan difasilitasi dengan tempat pengumpulan sampah khusus botol air minum dalam kemasan plastik. Tempat pengumpulan sampah botol air minum dalam kemasan ini merupakan pemberian pihak mitra Proklim yaitu perusahaan yang telah mengamati dan percaya akan komitmen penggiat Proklim dalam pengendalian perubahan iklim. Tidak jauh dari fasilitas umum untuk berolahraga, pesan risiko mitigasi perubahan iklim ditempatkan pada setiap papan penunjuk arah dimana upaya pengendalian perubahan

iklim telah dilakukan oleh warga bersama penggerak proklim tersebut. Penggunaan *solar cell* misalnya, telah ditempatkan di balai warga untuk menghimpun energi matahari sehingga dapat mengumpulkan arus untuk pencahayaan di balai warga dan sekitarnya, sebagai bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dengan penggunaan energi baru terbarukan. Sementara untuk aksi adaptasi, narasi kebun toga, mijel (minyak jelantah), eco enzyme, zona hijau, dan proses mengolah sumber pangan menjadi makanan dan minuman sehat, diperlihatkan pada papan penunjuk agar kesadaran warga terhadap pengendalian perubahan iklim setiap saat diingat dan dipahami sebagai aksi bersama antara warga dan penggiat proklim.



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 4: Pesan Mitigasi dan Adaptasi pada penunjuk arah

Para penggerak kampung iklim yang digawangi oleh Ibu Lala Gazali, telah bersama-sama mengemas pesan risiko yang sebelumnya disampaikan oleh DLH tentang pengendalian perubahan iklim. Aksi mitigasi untuk menurunkan GRK tidak hanya menyematkan pesan berbasis pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, namun tata cara pembuatan kompos menjadi pesan penting yang harus dipahami oleh warga di kampung iklim tersebut. Pengolahan kompos

Pesan risiko pengendalian perubahan iklim secara kreatif disisipkan pada produk-produk cendera mata yang diproduksi oleh para Ibu penggiat Proklam. Media tanam, sabun dan minyak jelantah, pin, topi, kaos, diberikan pesan risiko tentang pentingnya mitigasi perubahan iklim. Tas belanbja, serbet perca, produk *ecoprint*, serta aneka kerajinan berbahan baku sampah plastik, juga menjadi produk bernilai edukasi karena aksi mitigasi dengan pesan risiko pengendalian perubahan iklim selalu disematkan pada produk-produk tersebut. *Ecoprint* adalah salah satu produk unggulan Proklam RW11. Proses pembuatan produk kain dengan pemanfaatan daun yang dijadikan motif kain, menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Kain motif hasil *ecoprint* ini banyak dijadikan produk fashion. Menurut Lala Gazali, atas upaya aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh penggerak Proklam RW11 ini, *stakeholder* yang berasal dari perusahaan dan perguruan tinggi tertarik untuk berpartisipasi menjadi mitra. PT. Astra Internasional Tbk. menjadi perusahaan multi nasional yang memberikan pendampingan dan pendanaan untuk keberlanjutan Proklam RW11. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) nya bertajuk “Kampung Berseri Astra”, para penggiat Proklam tersebut dapat melaksanakan program pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi dengan mitra non Pemerintah.

Pesan risiko untuk pengendalian perubahan iklim di Kampung Iklim RW 11 Pekayon Jaya menjadi lebih bervariasi dengan hadirnya pihak ketiga.

Selain perusahaan, perguruan tinggi pun menjadi mitra kampung iklim ini. Perguruan tinggi ternama di Jakarta dan Tangerang Selatan melakukan pengabdian kepada masyarakatnya di wilayah ini. Kedua perguruan tinggi tersebut turut menyebarluaskan pesan risiko pengendalian perubahan iklim melalui saluran komunikasi digital yang sebelumnya tidak dirancang oleh para penggiat Proklam. Pesan risiko melalui media digital menjadi dapat dipersonalisasi karena *platforms* yang dibuat merupakan saluran yang dapat diakses lebih mudah dan tanpa batas ruang dan waktu. Informasi yang disampaikan kepada khalayak selalu *UpToDate* sehingga pesan risiko penurunan mitigasi dan adaptasi lebih bermakna.

Pengelolaan pesan risiko pada wilayah dengan potensi bencana iklim seperti di Kota Bekasi yang menjadi bagian dari Jabodetabek, telah menjadi upaya dari komunikasi risiko Pemkot Bekasi. Pemkot Bekasi sangat diuntungkan dengan keberadaan para penggiat kampung iklim karena mereka telah memiliki sikap dan keyakinan untuk mempercayai fenomena alam yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Secara prinsip, pesan risiko akan lebih mudah diterima jika khalayak sasaran memang memiliki perhatian dan *concern* akan perubahan iklim itu sendiri (Mildenberger et al., 2019). Pada Proklam RW11 Pekayon Jaya, para penggiat Proklam secara bersamaan telah memiliki keyakinan tentang perubahan iklim sebagai fenomena alam yang harus nyata. Latar belakang pendidikan para penggiat Proklam yang cukup baik, pengalaman mereka sebagai praktisi atau profesional di bidangnya, telah meringankan tugas DLH Pemkot Bekasi dalam mendampingi dan membina Proklam sebagai amanah pemerintah pusat dalam mengendalikan perubahan iklim di tingkat tapak.

SIMPULAN

Program Kampung Iklim merupakan program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah

melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi, sehingga dapat mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Proklamasi RW 11 Pekayon Jaya memiliki keterkaitan erat dengan Pemkot Bekasi sebagai *leading sector* yang memberikan pembinaan dan pendampingan seluruh program mitigasi dan adaptasi. Dalam menyampaikan komunikasi risiko terkait bencana hidrometeorologi, Pemkot Bekasi menyampaikan pesan risiko secara intens kepada pengurus dan penggiat Proklamasi dengan inti pesan pengurangan emisi GRK untuk mitigasi dan menyesuaikan terhadap dampak bencana pada aksi adaptasi. Pesan risiko pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan disampaikan oleh DLH Pemkot Bekasi melalui pertemuan langsung atau daring. Para penggiat Proklamasi kemudian mengembangkan pesan risiko ke dalam saluran komunikasi luar ruang, tercetak, pertemuan antar warga, hingga membangun kemitraan dengan perusahaan dan perguruan tinggi. Pada kerjasama dengan kedua stakeholder terakhir, Proklamasi dapat menyusun dan mengembangkan pesan risiko melalui media digital melalui *platform* website, IG, dan Youtube. Dalam proses pengembangan pesan risiko, Pemkot Bekasi secara administratif mendampingi Proklamasi dan para penggiatnya sebagai salah satu upaya untuk meraih penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu dalam kategori Utama dan Lestari. Komunikasi risiko yang disampaikan oleh Pemkot Bekasi kepada Proklamasi RW11 tidak terlalu sulit dilakukan. Dengan program dan aktivitas yang beragam dalam aksi mitigasi dan adaptasi serta keterlibatan penggiat Proklamasi di setiap kegiatan pengendalian perubahan iklim, Pemkot Bekasi sangat diuntungkan dalam memberikan pesan-pesan risiko bencana iklim. Peran Pemkot Bekasi sebaiknya ditingkatkan dalam mendampingi para penggiat Proklamasi RW 11. Tidak hanya dalam urusan administrasi atau

syarat pengajuan sebuah Proklamasi. Namun, bagaimana mengemas pesan risiko untuk seluruh warga, juga dapat didampingi. Hadirnya mitra perusahaan dan perguruan tinggi dalam pendampingan penyusunan pesan risiko, tetap harus melibatkan Pemkot Bekasi sebagai *leading sector* kebijakan dalam pengendalian perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni Z, Fara Merian Sari, P. (2021). Penguatan Kelembagaan Kampung Iklim Tobekgodang Kota Pekanbaru Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(4).
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>
- Bekasi Satu. (2022). *Harumkan Kota Bekasi, Pekayon Jaya Borong Penghargaan Proklamasi Jawa Barat*. Bekasi Satu. <https://www.bekasisatu.id/2022/12/harumkan-kota-bekasi-pekayon-jaya.html>
- Boholm, Å. (2019). Risk Communication as Government Agency Organizational Practice. *Risk Analysis*, 39(8).
<https://doi.org/10.1111/risa.13302>
- Canel, M. J., & Sanders, K. (2013). Introduction: Mapping the field of government communication. In *Government Communication: Cases and Challenges*.
<https://doi.org/10.5040/9781472544629.ch-001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Dini, V. A. (2021). *Jawa Barat Paling Sering Dilanda Cuaca Ekstrem Sepanjang 2021*. KataData.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/01/jawa-barat-paling-sering-dilanda-cuaca-ekstrem-sepanjang-2021>
- Ditjen Pengendalian Perubahan. (2018). *PROKLIM: PENYUSUNAN RENCANA AKSI ADAPTASI BERBASIS MASYARAKAT*.
<http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/imag>

- es/file_dokumen/proklam/rakor2018/hari_pertama/sesi1/Tahap-Pengembangan-API-ke-Daerah---Perencanaan.pdf
- Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. (2020). Rencana Strategis Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. In *Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024*. <http://spbe.go.id/renstra>
- Fatimah, S. (2020). *Ini Daerah Rawan Bencana Alam di Jabar Versi BMKG*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5214723/ini-daerah-rawan-bencana-alam-di-jabar-versi-bmkg>
- Fatkullah, M., Mulyani, I., & Dewi, A. S. (2023). Strategi Komunikasi dalam Mengatasi Perubahan Iklim melalui Pelibatan Masyarakat Communication Strategy to Address Climate Change through Community Engagement. *Komunikasi Pembangunan*, 21(03). <https://doi.org/10.46937/21202341909>
- Forney, S. Z., & Sadar, A. J. (2021). *Environmental Risk Communication*. CRC Press.
- Furqan, H. M., Azis, D., & Wahyuni, R. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim di Gampong Lambung Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Pendidikan Geosfer*, 5(2). <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Kar, B., & Cochran Jr., D. M. (2019). *Risk Communication and Community Resilience*. Routledge. www.routledge.com/Routledge-
- Lundgren, E. Regina, McMakin, H. A. (2013). Risk Communication. In *John Anderson* (5th ed.). John Wiley&Sons, Inc. www.copyright.com
- Mildenberger, M., Lubell, M., & Hummel, M. (2019). Personalized risk messaging can reduce climate concerns. *Global Environmental Change*, 55(April 2018). <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.01.002>
- O'Hair, D., & John, O. M. (2022). *Communication and Catastrophic Events; Strategic Risk and Crisis Management*. Wiley Blackwell. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Government Risk Communication on Greenhouse Gas Emission Reduction To Tackle Climate Change. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2). <https://doi.org/10.33299/jpkop.24.2.3416>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2021). *Kepengurusan Proklam RW 11*.
- poskota. (n.d.). *Inilah wilayah yang paling rawan longsor di Jawa Barat*. Retrieved October 11, 2023, from <https://poskota.co.id/2021/09/15>
- Reza Rinaldy, O., Nulhaqim, S. A., & Surya Gutama, A. (2017). *Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon* (Vol. 4, Issue 2). www.menlh.go.id.com
- Sugardiman, R. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim*.
- Syah, P. K. (2022). *34 bencana melanda Kabupaten Bekasi tahun 2022*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/2654837/34-bencana-melanda-kabupaten-bekasi-tahun-2022>
- The World Bank. (2013). *Risk Communication*.
- United Nations. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. In *UNISDR* (Vol. 144, Issue 2).
- WHO. (2023). *Risk Communication*. Risk Communication. <https://www.who.int/emergencies/risk-communications>
- Woodside, A. G. (2010). *Case study research : theory, methods, practice*. Emerald Group Pub.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications. Sixth Edition* (6th ed.). SAGE Publications Inc.

